

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan merupakan kunci utama bagi *stakeholder* untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan, dan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi bagi para pemakainya. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2006). Tujuan laporan keuangan adalah (Nungraheni, 2010):

1. Informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas.
2. Pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber dana.
3. Membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas masa depan.

Laporan keuangan memiliki pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas sumber daya yang dipercayakannya. Terdapat komponen laporan keuangan didalam laporan keuangan yaitu:

- a) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
- b) Laporan laba rugi komprehensif selama periode
- c) Laporan arus kas selama periode
- d) Catatan atas laporan keuangan
- e) Laporan posisi keuangan awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, menyajikan

kembali, atau mereklasifikasi pos-pos laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Laporan keuangan didalam penyajiannya yang diutamakan adalah transparansi dan relevan, karena laporan keuangan akan berguna bagi para investor dan pemakai lainnya. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang ingin mempercantik laporan keuangan sehingga banyak sekali timbulnya kecurangan, dimana salah satunya adalah manajemen laba.

Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengabarkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Semua itu dilakukan untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer (Sulistyanto, 2008). Menurut Wild *et al.* (2007) menyatakan bahwa : *“An earning (also reffered as income) is the net of revenues and gains less expenses and losses. It is determined using acrual basis of accounting and annually reported into income statement.”*

Apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut:

“Laba adalah pendapatan bersih dan keuntungan dikurangi dengan beban-beban dan kerugian. Laba tersebut ditentukan dengan menggunakan dasar akrual dan secara tahunan dilaporkan dalam laporan laba rugi.”

Laba meringkas aktivitas operasi bisnis perusahaan. Wild *et al.* (2007) berkomentar bahwa laba merupakan informasi perusahaan yang paling diinginkan dalam pasar keuangan. Laba memberikan baik pengukuran terhadap perubahan ekuitas perusahaan pada suatu periode maupun estimasi kekuatan laba perusahaan di masa mendatang. Terdapat beberapa faktor yang dianggap mampu menjadikan upaya rekayasa manajerial ini membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Pertama,

aturan dan standar akuntansi, transparansi dan *auditing* yang masih lemah. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, *moral hazard* pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya (Sulistyanto, 2008).

Motivasi manajemen melakukan manajemen laba adalah adanya program bonus, perusahaan akan *go public*, motivasi perjanjian utang, pergantian *Chief Executive Officer* (CEO), meningkatkan kepercayaan kreditor dan investor, ataupun menghindari pajak dan kebijakan pemerintah (Scott, 2009). Menurut Scott (2009), manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi keuangan yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka atau nilai pasar perusahaan. Manajemen memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk modifikasi laba yang dilaporkan, salah satu cara dalam mengurangi manajemen laba adalah kualitas audit yang baik.

Menurut Putri dan Yuyetta (2013) terjadinya manajemen laba selain karena tindakan manajemen yang oportunistik, manajemen terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol pada perusahaan. Struktur kepemilikan (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) dipercaya mampu memengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki. Selain itu untuk mendeteksi praktik manajemen laba dibutuhkan pihak lain yang independen yaitu auditor. Auditor yang berkualitas baik akan bertindak sebagai pencegah manajemen

laba yang efektif karena manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun apabila pelaporan keuangan yang salah ini terdeteksi dan terungkap.

Praktik manajemen laba yang seringkali dilakukan manajemen dapat menurunkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan, selain itu tindakan ini dapat merugikan investor karena mereka akan memperoleh informasi yang tidak sesuai mengenai posisi keuangan perusahaan. Praktik manajemen laba dianggap telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh kalangan praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan dalam beberapa dekade terakhir (Wardhani dan Joseph dalam Nabila dan Daljono, 2013).

Tahun 2011, jumlah pemeriksaan yang ditangani badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan mengalami peningkatan, dari 130 kasus di tahun 2010, menjadi 178 kasus. Dari jumlah 178 kasus tersebut diantaranya 59 kasus telah selesai dan dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam-LK dan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 4 kasus ditutup demi hukum karena tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, 81 kasus telah selesai pada tahap proses pemeriksaan namun masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses lebih lanjut, dan 34 kasus masih dalam proses pemeriksaan. Dari 178 kasus pemeriksaan, 81 kasus terkait transaksi dan Lembaga Efek, 78 kasus terkait Emiten atau Perusahaan Publik, dan 19 kasus terkait pelanggaran di bidang pengelolaan investasi. Sementara itu, jumlah kasus yang dalam proses penyidikan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sejumlah dua belas kasus. Dari 12 kasus penyidikan, 8 diantaranya merupakan kasus terkait transaksi dan Lembaga Efek, 2 kasus terkait Emiten atau Perusahaan Publik, dan 2 terkait

Pengelolaan Investasi (Bapepam-LK, 2011). Terjadinya banyak kasus dalam pasar modal menjadi fenomena yang sulit dipercaya karna dampak dari kasus tersebut merugikan banyak pihak, yaitu investor, karyawan, manajer, KAP lain yang tidak terlibat kasus tersebut ikut terbawa dengan keadaan sebagai profesinya auditor, hingga publik sebagai pengamat pasar modal ikut dirugikan, tidak sedikit publik yang kecewa dengan banyaknya kasus pelanggaran pasar modal karena jika perusahaan di Indonesia tidak dapat berkembang maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri.

Terdapat kasus kecurangan yang sangat fenomenal yaitu PT. Kimia Farma Tbk. Kasus ini sempat menjadi pembicaraan banyak pihak dan mempertanyakan independensi dan kejujuran auditor, dimana di audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan terdapat laba bersih sebesar Rp 132 milyar, kemudian laporan keuangan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Kementerian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar serta mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar (24,7%) dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan tersebut timbul pada unit industri bahan baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Diduga upaya penggelembungan dana yang dilakukan oleh pihak direksi

PT. Kimia Farma Tbk. dilakukan untuk menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada PT. Kimia Farma. (Fitrawansyah, 2014).

Adanya kasus PT. Kimia Farma Tbk. tersebut menjadi fenomena yang cukup besar dalam dunia akuntansi. Kasus PT. Kimia Farma Tbk. ini membuat masyarakat jadi lebih enggan untuk percaya kepada akuntan publik di Indonesia. Kemudian KAP di Indonesia pun harus berusaha kembali untuk membentuk kepercayaan masyarakat pada kualitas audit. Kualitas audit yang tinggi diharapkan akan mengurangi terjadinya kasus manipulasi laba dan memberikan hasil yang menguntungkan *stakeholders* dan perusahaan, salah satunya berupa laporan keuangan yang transparan dan relevan. Selain itu, diharapkan perusahaan bersikap konsisten dalam menyajikan laporan keuangan yang akan di-*publish* dengan laporan keuangan untuk perusahaan sendiri. Perusahaan dikatakan konsisten apabila menerapkan perlakuan akuntansi untuk kejadian yang serupa dari satu periode ke periode berikutnya, tetapi dimungkinkan perubahan perlakuan akuntansi dilakukan tanpa melanggar sebuah konsistensi apabila lebih *preferable* dari perlakuan yang lama (Kieso *et al.*, 2010). Selain itu, investor harus selalu berhati-hati terhadap perusahaan yang akan ditanamkan modalnya, investor juga diharapkan untuk bisa menganalisis laporan keuangannya, apakah benar perusahaan ini menyajikan laporan keuangannya dengan benar atau tidak.

Menurut Praptitorini dan Januarti (2011), hanya auditor yang berkualitas yang dapat menjamin bahwa laporan (informasi) yang dihasilkannya *reliable*. Kualitas audit diartikan sebagai probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien (Deangelo, dalam Nataline, 2007). Semakin tinggi kualitas audit dapat dihasilkan oleh auditor

independen, maka semakin tinggi pula kepercayaan para pemakai informasi untuk menggunakan laporan keuangan. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Elfarini, 2007).

Kualitas audit dapat diukur melalui nama baik auditor, dimana di Indonesia dulu Kantor Akuntan Publik (KAP) dikenal dengan nama *Big Five* yaitu Artur Andersen, Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG, Peat Marwick Mitchell dan Price Waterhouse Coopers, kemudian pada tahun 1998 bergabung menjadi Price Waterhouse and Coopers & Lybrand. Dari tahun 2002 hingga saat ini Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik dikenal dengan *Big Four*, yaitu Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG dan Price Waterhouse Coopers. Empat besar KAP tersebut hampir mengaudit semua perusahaan-perusahaan di seluruh dunia.

Praktik manajemen laba dapat dikurangi, selain kualitas audit yang baik, komposisi dewan komisaris juga ikut berperan dalam mengurangi praktik manajemen laba, dimana berfungsi untuk mengurangi manajemen laba, dewan komisaris ditunjuk langsung melalui rapat pemegang saham, mereka akan memilih orang yang berkompeten dan independen untuk menjadi dewan komisaris independen, oleh karena itu jika dewan komisaris independen semakin banyak seharusnya perusahaan dapat lebih baik lagi dalam menyajikan laporan keuangan. Dewan komisaris mempunyai tugas dalam bertanggung jawab dan mengawasi tindakan Direksi serta membentuk komite audit. Oleh sebab itu, independensi Komisaris sangat diperlukan. Dalam surat Keputusan Menteri BUMN, ada kewajiban bahwa proporsi Komisaris yang berasal dari luar perusahaan, dibandingkan terhadap

total Komisaris minimal adalah 20%. Karena tanggung jawabnya yang besar, Komisaris yang independen akan menuntut kualitas audit yang lebih baik. Hal ini dikarenakan keharusan mereka untuk menjaga reputasi mereka (Hay *et al*, 2008).

Banyak yang mengatakan bahwa semakin besar komposisi dewan komisaris indepen maka praktik manajemen laba akan semakin kecil, hal itu dikarenakan lebih banyaknya pihak yang independen untuk mengontrol suatu perusahaan agar berjalan dengan baik. Pihak yang independen ini biasanya akan lebih memberikan masukan yang mementingkan kepentingan perusahaan bukan kepentingan individu setiap pemegang saham, tetapi ada pula yang mengatakan semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin besar pula praktik manajemen laba yang dikarenakan ketidak efisienan dalam memberikan pengawasan dan tanggungjawabnya (Nuryaman, 2008).

Menurut Limantauw (2012), karakteristik dewan komisaris terkait dengan proporsi komisaris independen perlu diperhatikan supaya terdapat independensi dalam proses pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komisaris yang independen, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan lebih ketat sehingga akan cenderung mensyaratkan akuntansi yang konservatif untuk mencegah sikap oportunistik manajer. Kepemilikan saham oleh komisaris yang terafiliasi dapat memengaruhi kinerja suatu perusahaan. Apabila komisaris yang terafiliasi bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas pengawasannya, dengan memiliki sebagian saham perusahaan akan membuat komisaris menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih ketat. Hal tersebut dikarenakan komisaris memiliki kepentingan finansial di dalam perusahaan sehingga lebih mensyaratkan akuntansi yang konservatif. Akan tetapi, apabila kepemilikan

saham oleh komisaris yang terafiliasi tersebut justru mendorong komisaris melakukan pengambil alihan perusahaan maka prinsip akuntansi yang digunakan kurang konservatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian Siregar dan Utama (2005) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan Ujiyantho dan Pramuka (2007) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Adapula penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan bagaimana pengaruh kualitas audit yang diukur dengan *Big four* atau non *Big four* salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gerayli, *et al.* (2011) menyatakan bahwa ukuran auditor berhubungan negatif dengan manajemen laba diukur dengan *discretionary accrual*, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan auditor *Big four* maka manajemen laba akan lebih rendah dengan perusahaan yang diaudit oleh non *Big four*.

Analisis lebih lanjut lagi diungkapkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas audit dan manajemen laba hanya signifikan dalam perusahaan yang di audit oleh *Big four*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gerayli, *et al.* (2011) bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Guna dan Herawaty (2010), kepemilikan institusi dan kepemilikan manajerial serta independensi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi hasil jika diterapkan pada sampel yang berbeda.

Dari penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan kualitas audit dan komposisi dewan komisaris sebagai variabel independen. Kualitas audit diukur

berdasarkan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big four* dan KAP non *Big Four*, kemudian komposisi dewan komisaris diukur dengan berapa banyak proporsi dewan komisaris independen jika dibandingkan dengan total dewan komisaris. Variabel dependen adalah manajemen laba. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah terletak dari keseluruhan variabel independen.

Dalam penelitian ini, badan usaha yang digunakan adalah badan usaha yang bergerak di bidang manufaktur yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti tertarik untuk meneliti karena badan usaha ini menarik untuk dicermati dan diteliti, dimana terdapat banyak kasus manipulasi pasar modal yang mendominasi pelanggaran di bidang transaksi dan Lembaga Bursa Efek (www.bapepam.go.id).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“Pengaruh Kualitas Audit dan Komposisi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap manajemen laba ?
2. Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

1.4. Kegunaan Penelitian

Praktik manajemen laba menjadi hal yang sering dilakukan oleh para manajer kepada *stakeholders* dan dengan melihat tujuan penelitian diatas, diharapkan dengan adanya penelitian yang saya buat ini diharapkan kedepanya:

1. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan tentang bagaimana pengaruh kualitas audit dan komposisi dewan komisaris terhadap manajemen laba, serta dapat membandingkan teori dengan keadaan sebenarnya.

2. Investor

Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga investor dapat mendeteksi adanya manajemen laba dan pengambilan keputusan yang baik.

3. Perusahaan

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan lebih mendalam mengenai manajemen laba, sehingga

perusahaan dapat mendeteksi adanya potensi manajemen laba di perusahaan.

4. Pihak lain

Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi anda yang akan melakukan studi penelitian sejenis.